

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan melalui alat pengumpul data primer berupa angket. Pemaparan data hasil penelitian ini pada dasarnya berusaha mencari dan mengetahui bagaimana dampak program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap kondisi sosial dan perumahan di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi tahun 2012 yang terdiri dari 114 responden yang tersebar di 3 Desa daerah penelitian yang meliputi Desa Bangun, Desa Parbuluan IV, dan Desa Parbuluan V.

#### 1. Identitas Responden

##### a. Umur Responden

Komposisi umur masyarakat penerima dana BSPS di Kecamatan Parbuluan dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Parbuluan Tahun 2011.**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1.	21- 30	4	5	2	11	9,64
2.	31- 40	23	11	3	37	32,45
3.	41- 50	24	7	5	36	31,57
4.	51- 60	4	9	6	19	16,66
5.	61- 70	4	3	2	9	7,89
6.	> 70	2	0	0	2	1,75
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Dari tabel 8 terlihat bahwa masyarakat penerima dana BSPS di Kecamatan Parbuluan tergolong dalam masyarakat yang produktif, dengan demikian swadaya masyarakat juga tergolong tinggi. Suhardjo dan Patong dalam Simanjuntak. B, (1986) menyatakan bahwa umur produktif manusia berkisar 15-45 tahun, komposisi usia demikian cukup baik jika dilihat dari kapasitas kerja mereka dan diharapkan akan lebih dinamis dalam mengikuti kegiatan pembangunan serta mempunyai kemampuan berusaha yang lebih baik sebagai mana upaya untuk meningkatkan pendapatan.

#### **b. Status Kepemilikan Rumah**

Status kepemilikan rumah penerima dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Desa Parbuluan IV, Desa Parbuluan V, dan Desa Bangun Kecamatan Parbuluan adalah 100 % milik sendiri. (Sumber Kantor Camat Tahun 2012). Status kepemilikan rumah adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima BSPS yaitu milik sendiri. Rumah dengan status milik sendiri akan lebih memotivasi dan lebih peduli akan kualitas perumahan karena akan dihuni dalam jangka yang panjang atau bahkan sampai akhir hidupnya.

#### **c. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan masyarakat penerima BSPS masih tergolong rendah terlihat bahwa banyak yang berpendidikan dasar saja (SD-SMP) sehingga masyarakat tidak mampu untuk bersaing dalam lapangan pekerjaan dan hanya bisa bekerja di sektor informal dibidang pertanian. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penerima BSPS dapat dilihat pada tabel 9.

**Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Tingkat Pendidikan	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	7	24	6	37	32,45
2	SMP	21	25	8	54	47,36
3	SMU	7	10	4	21	18,42
4	Sarjana	0	2	0	2	1,75
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

#### **d. Jenis Pekerjaan**

Jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat penerima BSPS, hasilnya dapat dilihat pada tabel 10 .

**Tabel 10. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Jenis pekerjaan	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa parbuluan V	Jumlah	Presentase (%)
1	Petani	49	30	18	97	85,08
2	Pedagang	10	4	0	14	12,28
3	Wiraswasta	2	1	0	3	2,63
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa bahwa masyarakat penerima BSPS di Kecamatan Parbuluan pekerjaannya mayoritas sebagai petani, hal ini dipengaruhi tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga tidak mampu bersaing untuk dunia pekerjaan serta didukung oleh kondisi fisik tanah yang subur yang cocok dijadikan lahan pertanian.

#### **e. Jumlah Anak**

Anak merupakan tanggung jawab bagi setiap orang tua. Banyaknya jumlah anak akan berpengaruh pada banyaknya jumlah atau biaya yang akan dikeluarkan sebagai

biaya hidup, semakin banyak anak maka semakin banyak juga biaya yang diperlukan. Untuk mengetahui jumlah anak yang dimiliki oleh para penerima BPS di Kecamatan Parbuluan, hasilnya dapat dilihat pada tabel 11, yang menunjukkan bahwa di kecamatan parbuluan tepatnya di 3 desa yang menjadi objek penelitian angka kelahiran masih tinggi, budaya yang menyatakan banyak anak banyak rejeki masih melekat, walaupun sebenarnya banyak anak banyak kebutuhan juga.

**Tabel 11. Jumlah Anak Masyarakat Penerima BPS di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Jumlah Anak	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	1-3	6	7	3	15	14,03
2	4-6	29	18	7	5	47,36
3	7-9	26	10	8	44	38,59
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

## 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Program BPS di Kecamatan Parbuluan

### a. Pengetahuan Responden terhadap Syarat Syarat Penerima BPS

Setiap penerima BPS harus mengetahui syarat- syarat penerima BPS hal ini tentu sangat penting untuk menunjang kelancaran pembangunan perumahan. Seluruh masyarakat penerima BPS telah mengikuti sosialisasi tentang syarat-syarat penerima BPS yang dilakukan di tiap desa yang diatur oleh setiap kepala desa beserta stafnya sesuai dengan syarat-syarat penerima BPS.

### b. BPS sebagai Stimulan terhadap Masyarakat untuk Membangun Rumah.

Program BPS yang dilaksanakan di kecamatan parbuluan diharapkan mampu merangsang atau memotivasi masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah

untuk membangun atau memperbaiki kondisi perumahan dari kondisi yang tidak layak huni menjadi layak huni. Pada dasarnya kondisi perekonomian yang lemah menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk tidak terfikirkan membangun rumah walaupun kondisinya sudah tidak nyaman. Masyarakat tentu lebih mengutamakan kebutuhan akan pangan, dan kebutuhan anak seperti kebutuhan sekolah dan yang lainnya, namun adanya program BSPS ternyata sangat memotivasi masyarakat untuk membangun dan memperbaiki rumah mereka, dan seluruh masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya mengakui alasan membangun dan memperbaiki rumah adalah karena adanya program BPS.

### c. Bentuk Bantuan yang Diterima oleh Responden

Bentuk bantuan yang telah dirancang oleh pemerintah adalah bantuan dengan nominal Rp. 6 juta. Dengan demikian masyarakat diberi kebebasan untuk merenovasi bagian rumah yang dianggap perlu untuk direnovasi, dalam hal ini yang diutamakan adalah bagian rumah yang sudah mengalami kerusakan yang lebih parah. Untuk mengetahui bentuk bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima BPS dapat dilihat pada tabel 12

**Tabel 12. Distribusi Responden Berdasarkan Bentuk Bantuan yang Diterima di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Bantuan yang diterima	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Presentase (%)
1	50 % uang dan 50 % material	21	16	0	37	32,45
2	100 % material	40	19	18	77	67,54
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014



Tabel 12 menunjukkan bahwa bentuk bantuan yang diterima oleh masyarakat berbeda-beda yang disebabkan oleh adanya peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah setelah adanya pertimbangan bahwa bantuan dalam bentuk uang tunai dinilai kurang tepat karena hasilnya tidak maksimal yang disebabkan adanya pengalihan dana BPS untuk keperluan yang lainnya melihat keadaan tersebut pemerintah mengalihkan bantuan dalam bentuk bahan bangunan.

#### d. Sumber bahan material

Salah satu kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat penerima BPS adalah memperoleh bahan material. Masyarakat dibantu oleh tim pemberdaya masyarakat (TPM) yang telah dihunjuk oleh pemerintah pada tiap-tiap daerah sehingga masyarakat tidak membeli sendiri ke toko bangunan.

Contoh daftar bahan bangunan yang telah diajukan sesuai kebutuhan masyarakat penerima BPS kepada TPM dalam dua tahap pencairan dengan jumlah Rp.3.000.000,00 seperti terlihat pada tabel 13 dan tabel 14.

**Tabel 13. Pencairan Dana BPS Tahap I Dalam Bentuk Bahan Bangunan di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Jenis material	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	Batu bata	1050	Bh	450	472.000
2	Batu cadas	3	M3	10.000	300.000
3	Pasir	4	M3	10.000	400.000
4	Semen @ 50 kg	15	Zak	65.000	975.000
5	Kayu 2x2x4'	4	Btg	30.000	120.000
6	Kayu 2x3x4'	4	Btg	48.000	192.000
7	Seng Bjls 6 K 9 Jalur	13	Lbr	33.000	429.000
8	Paku campur	2	Kg	15.000	30.000
9	Rabung seng	3	Lbr	20.000	60.000
10	Paku seng	1	Kg	24.000	24.000
Total					3.000.000

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

**Tabel 14. Pencairan Dana BSPS Tahap II Dalam Bentuk Bahan Bangunan di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Jenis material	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	Batu bata	200	Bh	500	1000.000
2	Broti 2x2x4	20	Batang	26.000	520.000
3	Broto 2x3x4	10	Batang	32.000	320.000
4	Papan 3x4	30	Lbr	33.000	990.000
5	Seng 8 kk	14	Lbr	44.000	616.000
6	Semen @ 50 kg	7,0	Zak	65.000	455.000
7	Paku seng	3,3	Kg	30.000	99.000
Total					3.000.000

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

#### **e. Bentuk Renovasi yang Dilakukan Masyarakat Penerima BPS**

Bentuk renovasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima BPS dapat dilihat pada tabel 15.

**Tabel 15. Distribusi Responden Berdasarkan Bentuk Renovasi di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Bentuk Renovasi	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	Renovasi dinding	21	9	5	20	17,54
2	Dinding dan atap	18	10	3	29	25,43
3	Dinding,atap,Mck	8	10	10	29	25,43
4	Renovasi total	14	6	0	36	31,57
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014.

Dari tabel dapat dilihat bahwa BPS sangat merangsang masyarakat dalam perbaikan rumahnya hal ini terlihat bahwa presentase renovasi total lebih tinggi dengan demikian kualitas perumahan juga akan lebih tinggi.

#### **f. Proses Pengerjaan Bangunan**

Proses pengerjaan bangunan perumahan yang disarankan oleh pemerintah adalah dengan cara bergotong royong dengan tujuan untuk mengurangi biaya pengeluaran.

Perangkat desa juga diharapkan bisa mengarahkan masyarakat dengan cara membentuk kelompok untuk bergotong royong, namun proses pengerjaan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat penerima BSPS berbeda-beda, seperti yang terlihat pada tabel 16.

**Tabel 16. Proses Pengerjaan Bangunan yang Dikerjakan oleh Masyarakat di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Proses Pengerjaan	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	Gotong royong	10	14	18	42	36,84
2	Ahli bangunan.	51	21	0	72	63,15
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Dari tabel 16 dapat dilihat penggunaan jasa ahli bangunan lebih tinggi dari pada gotong royong hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu kurangnya kepercayaan kualitas bangunan jika tidak dikerjakan oleh ahli, masyarakat merasa lebih lama jika melakukan pembangunan melalui gotong royong walaupun sebenarnya system gotong royong adalah system yang disarankan oleh pemerintah untuk mengurangi biaya pengeluaran dari masyarakat, karena dengan menggunakan jasa ahli bangunan maka masyarakat harus mengeluarkan biaya lagi.

#### **g. Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengerjaan Bangunan**

Untuk mengetahui waktu yang dihabiskan untuk proses pembangunan rumah masyarakat di kecamatan Parbuluan dapat dilihat pada tabel 17. Pada tabel 17 terlihat bahwa tidak ada pembangunan rumah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 100 hari setelah serah terima bantuan telah ditandatangani oleh penerima.



**Tabel 17. Distribusi Responden Berdasarkan Waktu Pengerjaan Bangunan di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Waktu Pengerjaan Bangunan	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	1 Bulan	51	33	5	89	78,07
2	2 Bulan	10	2	8	20	17,54
3	>2 Bulan	0	0	5	5	4,38
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014.

#### **h. Penerima BPS yang Memanfaatkan Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam (SDA) yang terdapat di Kecamatan Parbuluan dapat dilihat pada gambar 4 dan 5.



Gambar 4. Sumber Daya Alam Berupa Pasir di Desa Bangun Tahun 2014.



Gambar 5. Sumber daya alam berupa pasir di desa Parbuluan IV Tahun 2014.

Sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan perumahan adalah sumber daya alam berupa pasir, batu, dan kayu. Sumber daya alam Kayu pada umumnya ada di 3 daerah penelitian, sementara sumber daya alam berupa pasir dan batu ditemukan di dua daerah penelitian yaitu desa Parbuluan IV, dan Desa Parbuluan V. Jumlah masyarakat penerima dana BPS yang memanfaatkan sumber daya alam di Kecamatan Parbuluan dapat dilihat pada tabel 18.

**Tabel 18. Distribusi Responden Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Alam di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Jenis Sumber Daya Alam	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	Pasir	0	1	3	4	3,60
2	Batu	0	2	3	5	4,30
3	Kayu	23	23	11	57	50,00
4	Tidak ada	38	9	1	48	42,10
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Dari tabel 18 diatas dari 114 responden menunjukkan bahwa sumber daya alam berupa kayu adalah sumber daya alam yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat dengan demikian masyarakat tidak perlu membeli dari toko bangunan hal ini juga akan mengurangi biaya masyarakat. Sementara untuk sumber daya alam berupa pasir dan batu masyarakat masih mengeluarkan biaya karena keberadaan sumber daya alam tersebut tidak dikelola oleh masyarakat setempat melainkan orang lain. Jika ada beberapa orang yang bisa menikmatinya adalah karena alasan tertentu yaitu masih memiliki ikatan keluarga dengan pihak pengelola, masyarakat yang masih tuan tanah, atau masyarakat yang bekerja sebagai karyawan.

### i. Tanggapan Masyarakat terhadap BSPS.

Tanggapan masyarakat terhadap dana BSPS adalah baik, bagi masyarakat pemerintah telah membantu masyarakat melalui dana BSPS untuk perbaikan dan pembangunan rumah mereka. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap dana BSPS dapat dilihat pada tabel 19.

**Tabel 19. Distribusi Responden Menurut Tanggapan terhadap Program BSPS di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Tanggapan terhadap BSPS	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	Memotivasi	45	23	3	71	62,28
2	Sangat memotivasi	16	12	15	43	37,71
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014.

Dari tabel 19 terlihat bahwa BSPS berhasil memotivasi masyarakat untuk membangun/ memperbaiki kondisi perumahan, karena sebelum adanya program BSPS masyarakat tidak terfikir untuk membangun/ memperbaiki rumah mereka, akan tetapi walaupun dan bantuan 6 juta tidak cukup untuk pembangunan dan perbaikan perumahan masyarakat mengakui BSPS adalah perangsang untuk membangun.

### 3. Keadaan Ekonomi Responden

#### a. Jumlah Penghasilan Utama.

Masyarakat penerima dana BSPS di Kecamatan Parbuluan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah terbukti dari tingkat penghasilan masih rendah. Untuk mengetahui jumlah pendapatan masyarakat penerima BSPS dapat dilihat pada tabel 20.



**Tabel 20. Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Utama Tiap Bulan di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Jumlah penghasilan (Rp)	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	< 1.000.000	29	25	18	72	63,15
2	1.000.000-1.500.000	30	10	0	40	35,08
3	1.501.000-2.000.000	2	0	0	2	1,75
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Dari tabel 20 terlihat bahwa bahwa pendapatan masyarakat penerima dana BSPS masih sangat rendah sehingga layak menjadi sasaran program BSPS.

#### **b. Tabungan Masyarakat Penerima BSPS**

Tabel 21 menunjukkan bahwa Sebagian besar penerima BSPS tidak memiliki dana simpanan atau tabungan, hal inilah yang menjadi kelemahan penerapan program BSPS karena pada dasarnya masyarakat yang menjadi sasaran BSPS adalah masyarakat yang sudah memiliki tabungan atau asset yang dapat digunakan sebagai dana tambahan untuk biaya pembangunan sehingga keadaan ini juga yang memicu terjadinya beban hutang yang harus ditanggung oleh masyarakat penerima BSPS.

**Tabel 21. Distribusi Responden Berdasarkan Ada Tidaknya Tabungan di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Ada tidaknya tabungan	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	Memiliki tabungan	20	7	0	27	23,68
2	Tidak memiliki tabungan	41	28	18	97	76,31
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014.

#### 4. Masalah Dalam Pelaksanaan Program BSPS

##### a. Jenis Masalah

Pelaksanaan program BSPS pada dasarnya disambut baik oleh masyarakat kecamatan Parbuluan. Namun pada pelaksanaannya kurangnya dana menjadi kendala yang berat bagi masyarakat, karena dana BSPS tidak cukup untuk perbaikan dan pembangunan rumah mereka. Seluruh masyarakat penerima dana BSPS di Parbuluan IV, Parbuluan V, dan Desa Bangun, mengakui keterbatasan dana merupakan kendala yang paling utama.

##### b. Cara Mengatasi Masalah

Masalah keterbatasan dana yang dihadapi oleh masyarakat penerima BSPS tidak dibiarkan begitu saja. Masyarakat berusaha keras untuk mengatasi masalah tersebut, cara yang ditempuh oleh masyarakat adalah dengan mencari pinjaman baik kepada saudara, tetangga atau warga setempat, atau bahkan berutang pada toko bangunan.

**Tabel 22. Distribusi Responden Berdasarkan Cara mengatasi Kekurangan Dana di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Cara mengatasi kekurangan dana	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	Pinjam pada warga setempat	15	14	12	41	35,96
2	Pinjam pada saudara	41	20	2	63	55,26
3	Hutang ke toko bangunan	5	0	2	7	6,14
4	Dibantu anak	0	0	2	2	1,75
5	Lain-lain	0	1	0	1	0,87
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014.



Dari tabl terlihat bahwa masyarakat pada umumnya berhutang kepada keluarga hal ini juga untuk mengurangi resiko baik dalam hal jaminan atau bunga pinjaman yang bisa dibicarakan secara kekeluargaan sebab jika meminjam kepada orang lain akan terbebani dalam hal bunga atau jaminan. Masyarakat juga tidak melakukan pinjaman ke Bank hal ini dikarenakan masyarakat tidak terlalu paham dengan prosedur yang dianggap masih rumit dengan persyaratan-persyaratan dari pihak bank.

## 5. Dampak Sosial Program BPS terhadap Responden

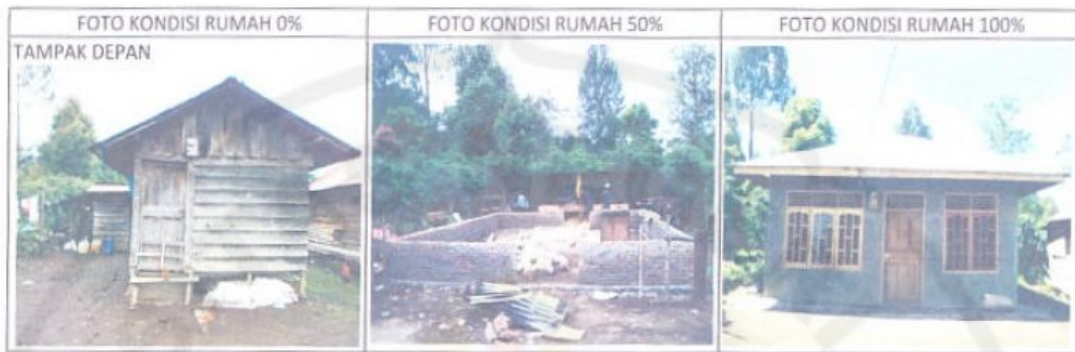
### a. Kondisi Perumahan

Secara umum kondisi perumahan masyarakat jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Adanya peningkatan kualitas rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni menunjukkan keberhasilan dari program BPS yang telah diterapkan oleh pemerintah. Layak tidaknya kondisi perumahan masyarakat penerima BPS hasilnya dapat dilihat pada tabel 23.

**Tabel 23. Distribusi Responden Berdasarkan Sesuai Tidaknya Kondisi Perumahan Setelah Program BPS di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Kondisi setelah program BPS	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	Layak	56	28	17	101	88,59
2	Tidak layak	5	7	1	13	11,40
	Total	61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014.



Gambar 8. Kondisi Fisik Rumah Mulai Dari 0% - 100 % dengan Status Layak Huni di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.



Gambar 9. Kondisi Fisik Rumah Mulai Dari 0% - 100 % dengan Status Tidak Layak Huni di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.

#### b. Dana Tambahan BSPTS

Tambahan dana yang dikeluarkan masyarakat dapat dilihat pada tabel 24. Pada tabel terlihat dari 114 responden menunjukkan bahwa besarnya tambahan biaya tergantung pada bentuk renovasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima BSPTS.

**Tabel 24. Distribusi Responden Berdasarkan Dana Tambahan di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Dana tambahan yang dikeluarkan	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	1.000.000 - 5.000.000	32	13	5	50	43,85
2	5.010.000 - 10.000.000	25	22	13	60	52,63
3	10.010.000 - 15.000.000	4	0	0	4	3,50
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014.

### c. Jaminan atas Pinjaman

Mengatasi kekurangan dana dengan cara meminjam bagi sebahagian masyarakat harus memberikan jaminan utang masyarakat. Adapun jaminan yang diberikan oleh masyarakat adalah berupa tanah, rumah, dan hasil panen yang akan dipanen. Untuk mengetahui jaminan pinjaman yang diberikan masyarakat, dapat dilihat pada tabel 25.

**Tabel 25. Distribusi Responden Berdasarkan Jaminan atas Pinjaman/ Hutang di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Jaminan atas pinjaman/ utang	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	Tanah	8	12	1	21	18,40
2	Rumah	10	7	0	17	14,90
3	Hasil panen	0	1	10	11	9,64
4	Tanpa jaminan	43	15	7	65	57,01
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2014

Dari data tabel 25 di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat meminjam tanpa ada jaminan, hal ini menunjukkan bahwa kekerabatan dan kepercayaan terhadap masyarakat masih ada karena masyarakat yang meminjam tanpa jaminan pada umumnya karena meminjam pada saudara atau famili, sementara yang menggunakan jaminan adalah karena masyarakat meminjam pada masyarakat tanpa ada ikatan keluarga yang dekat.

### e. Beban Hutang.

Beban hutang merupakan dampak dari program BSPS. Beban hutang masyarakat penerima BSPS dapat dilihat pada tabel 26.

**Tabel 26. Distribusi Responden Berdasarkan Ada Tidaknya Beban Hutang di Kecamatan Parbuluan Tahun 2012.**

No	Beban hutang	Desa Bangun	Desa Parbuluan IV	Desa Parbuluan V	Jumlah	Persentase (%)
1	Ada	61	34	16	111	97,36
2	Tidak ada	0	1	2	3	2,63
Total		61	35	18	114	100,00

Sumber : Data Primer Setelah, 2014

Dari tabel 26 menunjukkan bahwa beban hutang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat dana BPS senilai 6 juta tidak cukup untuk biaya perbaikan dan pembangunan rumah. Dengan demikian dampak dari program BPS selain membawa perubahan dalam peningkatan kualitas rumah ternyata juga membawa beban hutang terhadap kehidupan masyarakat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Dampak BPS Terhadap Kondisi Perumahan di Kecamatan Parbuluan.**

#### **a. Kondisi Fisik Rumah**

Peningkatan kualitas perumahan di Kecamatan Parbuluan merupakan dampak dari pelaksanaan program BPS yang secara umum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari perubahan status perumahan masyarakat dari status tidak layak huni menjadi layak huni. Peningkatan kualitas rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 90,35% yang meliputi renovasi dinding, atap, lantai dan MCK, sementara rumah dengan status tidak layak huni adalah rumah yang belum memenuhi kriteria rumah layak huni Sebanyak 9,64%. Adanya rumah yang tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat penerima dana BPS pasca program BPS 2012 adalah masyarakat dengan latar belakang MBR dan tidak memiliki tabungan ternyata tidak mampu mencari dana



tambahan untuk biaya perbaikan dan pembangunan rumah, masih terlihat kondisi rumah yang dalam keadaan rusak. Secara umum kondisi rumah yang tidak layak huni adalah kerusakan di bagian MCK 47,82 %, untuk bagian lantai yang masih rusak 30,43%, bagian dinding 13,04%, dan untuk bagian atap yang masih rusak 8,69% dengan kata lain masyarakat lebih mendahulukan perbaikan atap, dinding, sementara untuk lantai dan MCK masih dibelakangkan. Perbedaan status rumah adalah gambaran perbedaan swadaya masyarakat, semakin tinggi kualitas rumah yang dibangun oleh masyarakat semakin tinggi pula swadaya masyarakat.

#### **b. Bentuk Bantuan yang Diterima oleh Responden**

Pemerintah telah menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau merenovasi perumahan mereka dengan nominal enam juta rupiah. Pencairan dana dilakukan dalam 2 tahap, dengan perhitungan 50 % tahap I dan 50 % tahap kedua. Adapun pencairan tahap kedua jika dana pertama telah direalisasikan dengan baik yang dibuktikan dengan laporan survey dari tim pemberdaya masyarakat (TPM) yang telah ditentukan pada tiap-tiap daerah, selain pencairan dana yang bertahap penyaluran bantuan juga tidak serentak di Kecamatan Parbuluan. Hal ini disebabkan masyarakat harus menyiapkan beberapa berkas atau administrasi sehingga masyarakat yang cepat melengkapi berkas dan persyaratan akan lebih dahulu menerimanya, namun beberapa masyarakat juga ada yang terlambat mengurus berkas sehingga pencairan juga harus ditunda. Pada awalnya pemerintah menyerahkan bantuan dalam bentuk uang tunai 50 % atau senilai tiga juta rupiah, namun pencairan dana pertama dengan bentuk uang sebesar tiga juta rupiah dinilai kurang maksimal, mengingat bentuk bantuan dalam uang yang bisa dialih



fungsi oleh penerima pada akhirnya bisa mengakibatkan ketidak berhasilan program ini sehingga pemerintah kembali mempertimbangkan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang belum mengambil dana, dengan kata lain masyarakat yang telah lebih dahulu menerima bantuan dalam bentuk uang tunai telah memberikan pembelajaran serta pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah selanjutnya. Dengan kondisi ini pemerintah mengubah bentuk bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat tidak dengan uang tunai lagi tetapi dalam bentuk bahan material bangunan, sehingga masyarakat yang terlambat mengurus berkas ternyata bernilai positif juga dimana dana BSPS digunakan dengan tepat (100 % dalam bentuk material bangunan). Dalam hal ini TPM berpartisipasi aktif untuk membantu masyarakat, dengan menetapkan satu toko bangunan yang dijadikan sebagai penyalur material sementara masyarakat hanya memberikan daftar bahan bangunan yang mereka butuhkan.

### **c. Bentuk Renovasi yang Dilakukan Masyarakat Penerima BSPS**

Bentuk renovasi yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor ekonomi, serta kondisi fisik rumah, karena tingkat kerusakan juga berbeda-beda. Beberapa masyarakat hanya merenovasi atap, dinding, lantai, dan MCK yang mereka anggap yang lebih penting dan perlu diperbaiki, hal ini juga dipengaruhi dengan kesanggupan dana masyarakat. Sementara itu ada juga masyarakat yang melakukan renovasi total rumah mereka, bahkan sampai pada bentuk permanen. Ada dua sisi pada masyarakat yang melakukan renovasi total, pertama dana yang bisa dikelola lebih banyak / ekonominya lebih baik, kedua masyarakat juga punya persepsi kalau hanya renovasi sebagian tanggung, jadi

mereka berani meminjam / mencari dana tambahan yang lebih besar. Dari bentuk renovasi yang dilakukan oleh masyarakat sebanyak 31,57 % adalah renovasi total dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BSPS sangat memotivasi masyarakat untuk memperbaiki/membangun rumah, hal ini terlihat dari swadaya masyarakat yang besar terhadap program yang diterapkan oleh pemerintah, sementara masyarakat yang tidak renovasi total lebih memilih untuk memperbaiki komponen rumah di bagian atap dan dinding dengan alasan jika rumah bocor kenyamanan penghuni akan lebih terganggu mengingat bahwa curah hujan di Kecamatan Parbuluan tergolong tinggi setiap tahunnya. Selain itu Kecamatan Parbuluan yang berada di dataran tinggi menyebabkan cuaca dingin keadaan ini menjadi alasan bagi masyarakat untuk memperbaiki dinding karena dinding rumah yang rusak akan menyebabkan penghuni rumah kedinginan akibat angin yang masuk melalui celah-celah dinding khususnya di malam hari sehingga akan mengganggu waktu istirahat. Sementara itu komponen rumah seperti lantai dan MCK tidak terlalu diprioritaskan oleh masyarakat dengan alasan lantai tanah atau lantai semen yang rusak tidak terlalu bahaya jika dibandingkan dengan atap bocor dan untuk MCK masyarakat bisa mengatasinya dengan menggunakan kama mandi umum atau lahan di belakang rumah mereka.

#### **d. Proses pengerjaan Bangunan**

Proses pengerjaan bangunan yang disarankan oleh pemerintah adalah dengan cara gotong royong, hal ini juga dimaksudkan untuk menekan biaya pengeluaran masyarakat. dan perangkat desa telah mengatur pembagian kelompok yang sekaligus untuk mereka bergotong royong. Selain mengurangi biaya pengeluaran tradisi bergotong royong merupakan tradisi masyarakat yang hidup di pedesaan yang bisa memperkuat

sistem kekerabatan sosial. Namun yang menjadi kelemahan bergotong royong adalah waktu untuk pengerjaan akan cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan pengerjaan dengan ahli bangunan. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat penerima BSPS, selain itu beberapa masyarakat juga lebih memilih untuk menggunakan jasa ahli bangunan dengan asumsi hasilnya jauh lebih memuaskan, walaupun dengan memakai jasa ahli bangunan masyarakat harus menambah biaya lagi hal ini terlihat bahwa 63,15% masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa ahli bangunan dengan demikian dapat juga dilihat bahwa nilai gotong royong di Kecamatan Parbuluan sudah mulai luntur.

#### **e. Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengerjaan Bangunan**

Waktu pengerjaan rumah juga menjadi salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat penerima BSPS, sesuai dengan keputusan pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah swadaya di wilayah sumatera tentang penetapan penerima dana BSPS tahun anggaran 2012 di kabupaten Dairi, harus menyelesaikan peningkatan kualitas perumahan dengan jangka waktu 105 hari terhitung sejak pengambilan dana pada buku tabungan dari Bank. Penetapan waktu pengerjaan bangunan juga salah satu cara pemerintah untuk memotivasi masyarakat agar lebih serius dalam pembangunan yang sedang dilakukan, jika masyarakat tidak memenuhi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi berupa denda. Penetapan peraturan tentang waktu pengerjaan bangunan di Kecamatan Parbuluan bisa terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pengerjaan bangunan tidak melebihi batas waktu yaitu 105 hari, masyarakat penerima BSPS bisa menyelesaikan bangunan rumah tidak lebih dari 3 bulan. Lamanya waktu pengerjaan bangunan ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor selain dari

volume bangunan yang dikerjakan ternyata tenaga yang mengerjakan juga menjadi sangat penting, rumah yang dikerjakan oleh ahli bangunan sebanyak 63,15% di Kecamatan Parbuluan membutuhkan waktu yang lebih singkat yaitu selama 30 hari sementara itu bangunan yang dikerjakan oleh sistem gotong royong lebih membutuhkan banyak waktu yaitu 60 hari.

## **2. Dampak BSPS terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat.**

### **a. Beban Hutang.**

Beban hutang harus ditanggung oleh masyarakat penerima BSPS di Kecamatan Parbuluan, masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah dan pada umumnya tidak memiliki tabungan harus mencari dana tambahan dengan cara berhutang. Hal ini sudah menjadi konsekuensi yang harus diterima dan masyarakat juga mengakui mereka sudah ikhlas dengan hal itu. Jika peningkatan kualitas rumah sudah mereka dapatkan maka beban hutang adalah hal yang tidak bisa mereka hindari, dengan demikian BSPS membawa dampak terhadap kondisi perumahan dan membawa dampak terhadap kondisi kehidupan masyarakat di Kecamatan Parbuluan. Beban hutang yang harus ditanggung oleh masyarakat adalah sebagai akibat dari kelemahan penerapan peraturan/ syarat penerima dana BSPS, yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki tabungan atau aset lain yang dapat dijadikan sebagai sumber dana tambahan tapi pada kenyataannya sebanyak 76,31% masyarakat penerima BSPS tidak memiliki tabungan sehingga untuk mencari dana tambahan pembangunan rumah mereka adalah dengan cara meminjam/hutang. Sementara itu 23,68% masyarakat yang memiliki tabungan sekalipun ternyata harus menanggung hutang juga hal ini dikarenakan tabungan masyarakat juga jumlahnya belum cukup untuk dijadikan dana tambahan dan



terlihat bahwa 97,36 masyarakat adalah berhutang, sementara masyarakat sebanyak 2,63% yang tidak menanggung hutang adalah masyarakat yang dibantu oleh keluarga dengan sukarela misalnya bantuan dari anak-anak mereka yang sudah bekerja dan masyarakat yang hanya sedikit merenovasi bagian rumah, misalnya dinding saja, atau atap saja.

Rendahnya pendidikan masyarakat penerima BSPS di Kecamatan Parbuluan juga menjadi salah satu alasan untuk masyarakat kurang memahami program BSPS. Kurangnya pemahaman akan program pemerintah ini yang beranggapan bahwa bantuan pemerintah ditujukan bagi seluruh masyarakat miskin/ kurang mampu, sehingga masyarakat berusaha untuk menjadi sasaran penerima bantuan tanpa memikirkan akibat yang harus mereka tanggung.

#### **b. Dana Tambahan BSPS.**

Dana tambahan merupakan dana yang harus dikeluarkan setiap masyarakat dengan kata lain dana diluar dari BSPS. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab bagi seluruh masyarakat penerima BSPS di Kecamatan Parbuluan mengingat dana dari pemerintah hanya sebagai stimulan. Dana tambahan yang dikeluarkan oleh masyarakat berbeda-beda hal ini disebabkan bentuk bangunan dan renovasi yang dilakukan oleh masyarakat juga berbeda-beda, semakin besar renovasi yang dikerjakan maka semakin besar pula dana tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, selain itu masyarakat yang menggunakan jasa ahli untuk pengerjaan bangunan tentu akan menambah biaya yang lebih jika dibandingkan dengan masyarakat yang bergotong royong. Penambahan dana oleh masyarakat maksimal sampai 15 juta tentu bukan hal yang mudah mengingat pendapatan masyarakat masih sangat rendah yaitu 63,5% adalah masyarakat dengan



penghasilan dibawah 1 juta. Adanya penambahan dana yang dilakukan oleh masyarakat mengharuskan masyarakat untuk meningkatkan intensitas bekerja. Intensitas kerja masyarakat semakin meningkat, hal ini juga sebagai bukti bahwa swadaya masyarakat juga tinggi, dan seluruh masyarakat penerima BSPS melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan. Menjadi buruh juga salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan uang untuk menutupi pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

### **c. Jumlah Penghasilan Utama.**

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima seseorang setelah melakukan suatu kegiatan tertentu. Dari berbagai jenis aktifitas manusia yang dilakukan apalagi bernilai ekonomi tentunya mengharapkan imbalan dari apa yang dilakukannya. Hal ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan sejauh mana tingkat perekonomian para Penerima BSPS di Kecamatan Parbuluan, semakin tinggi jumlah pendapatan kesejahteraan keluarga juga akan lebih meningkat. Jumlah penghasilan utama atau pendapatan masyarakat penerima dana BSPS di Kecamatan Parbuluan masih tergolong rendah sebanyak 63,15% masyarakat penerima BSPS adalah dengan penghasilan dibawah 1 juta inilah yang menjadi alasan bahwa masyarakat di Kecamatan Parbuluan layak menjadi sasaran program BSPS. Rendahnya pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah yang membuat masyarakat tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan hanya bisa bekerja di sektor pertanian bahkan hanya bisa mengelola ladang dengan keahlian yang rendah juga. Hal inilah yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.

#### **d. Ada Tidaknya Tabungan Masyarakat Penerima BSPS.**

Perumahan swadaya diartikan sebagai rumah atau perumahan yang di bangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara berkelompok maupun secara individu. Konsep perumahan swadaya lebih menekankan pada peningkatan pembangunan dan pengelolaan secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun atau memperbaiki perumahan agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni. Dengan demikian masyarakat harus lebih berupaya untuk perbaikan atau pembangunan perumahan, dengan kata lain masyarakat harus lebih aktif dengan stimulan yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk menunjang pembangunan yang bertumpu pada swadaya masyarakat diharapkan telah memiliki dana simpanan atau tabungan yang telah dipersiapkan untuk perbaikan atau pembangunan rumah. Dengan demikian program BSPS akan berjalan lebih lancar. Hal ini juga menjadi kriteria penerima bantuan BSPS yang telah ditetapkan pemerintah yaitu didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan: memiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS dan ternyata 76,31% masyarakat penerima BSPS di Kecamatan Parbuluan dengan latar belakang berpenghasilan rendah tidak memiliki tabungan, hal ini disebabkan pendapatan yang diperoleh sangat sedikit masyarakat juga mengakui pendapatan yang tidak menetap sangat tidak memungkinkan untuk memiliki tabungan bahkan pendapatannya hanya bisa mencukupi kebutuhan

sehari-hari. Tidak adanya tabungan masyarakat menjadi kelemahan pelaksanaan pembangunan bahkan pemicu adanya hutang masyarakat. Pemerintah setempat mengakui kesulitan untuk menerapkan hal ini, banyak masyarakat tidak terima dengan hal itu, mereka justru menuntut bahwa mereka yang tidak memiliki tabungan adalah masyarakat berpenghasilan rendah serta menjadi alasan untuk ditolong sehingga pemerintah akhirnya mengikutsertakan masyarakat yang tidak memiliki tabungan, dengan syarat bahwa masyarakat telah bersedia mencari biaya tambahan dengan usaha mereka sendiri.

#### **e. Masalah dalam Pelaksanaan Program BSPS.**

Permasalahan yang paling mendasar dalam pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Parbuluan adalah dalam hal kekurangan dana. Dana bantuan dengan nominal enam juta rupiah bukanlah dana yang cukup untuk pembangunan sebuah rumah. Jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah tentu tidak cukup, sehingga kekurangan dana menjadi masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat penerima BSPS di Kecamatan Parbuluan. Adanya masalah kekurangan dana yang dihadapi oleh masyarakat adalah sebagai konsekuensi tabungan yang tidak dimiliki oleh masyarakat penerima BSPS.

#### **f. Cara Mengatasi Masalah.**

Cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah kekurangan dana yang dialami oleh masyarakat penerima BSPS di Kecamatan Parbuluan adalah dengan cara mencari pinjaman sebagai dana tambahan, jika tidak maka pembangunan rumah mereka tidak akan tercapai atau dalam kondisi yang tanggung. Pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat secara umum adalah kepada saudara, tetangga, dan ada juga yang utang material ke toko bangunan. Sebagian besar 55,26 masyarakat mendapatkan pinjaman

dari saudara dengan demikian masyarakat masih terbantu berbeda halnya dengan masyarakat yang meminjam pada warga setempat atau berhutang bahan pada toko bangunan pada umumnya mereka harus memberikan jaminan atas pinjaman tersebut

#### **g. Jaminan atas Pinjaman**

Mengatasi kekurangan dana dengan cara meminjam bagi sebahagian masyarakat harus memberikan jaminan hutang masyarakat. Adapun jaminan yang diberikan oleh masyarakat adalah berupa tanah, rumah, dan hasil panen dari ladang mereka, jika mereka tidak menepati waktu pengembalian maka tanah, rumah atau jaminan lainnya yang akan berpindah kepada orang yang telah memberikan pinjaman. Sebanyak 42,9 % masyarakat memberikan jaminan atas pinjaman itu artinya sebanyak 42,9% masyarakat beresiko kehilangan tanah, rumah dan hasil panen apabila tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Pada umumnya pengadaan jaminan adalah bagi masyarakat yang meminjam pada tetangga, atau hutang pada toko akan tetapi jika pinjaman adalah pada saudara pada umumnya mereka tidak memberikan jaminan tetapi dengan modal kepercayaan dan kekeluargaan.

#### **h. Masyarakat yang Memanfaatkan Sumber Daya Alam.**

Sumber daya alam adalah segala bentuk kekayaan alam yang tersedia di alam yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang tersedia di Kecamatan Parbuluan yang dapat digunakan sebagai bahan material bangunan adalah batu, pasir, dan kayu. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus membeli adalah kayu. Masyarakat Kecamatan Parbuluan yang mayoritas adalah petani yaitu sebanyak 50 % pada umumnya memiliki kayu di ladang masing- masing baik yang secara sengaja ditanam,

atau kayu yang tumbuh liar di sekitar ladang masyarakat yang dibiarkan sampai besar. Dengan demikian masyarakat terbantu karena hanya mengeluarkan biaya pengambilan kayu dari ladang mereka yang secara umum menggunakan mesin pemotong kayu.

Sumber daya alam berupa pasir ditemukan di 3 titik daerah penelitian namun yang menjadi kelemahannya adalah pihak yang mengelola sumber daya alam tersebut bukan masyarakat setempat tetapi dikelola oleh orang lain yang berasal dari desa yang lain, dan beberapa masyarakat setempat hanya sebagai karyawan, hal ini menyebabkan hanya sedikit masyarakat yang bisa menggunakan pasir tanpa mengeluarkan biaya, sementara bagi masyarakat lainnya terbantu dalam hal ongkos/ biaya angkut yang lebih ringan karena jarak tempuh yang dekat. Sementara untuk sumber daya alam berupa batu ditemukan di 2 titik daerah penelitian yaitu di desa Parbuluan IV, dan Desa Parbuluan V, namun pengelolaannya sama dengan sumber daya alam pasir. Masyarakat yang dapat menggunakan sumber daya alam berupa pasir dan batu secara gratis / tidak mengeluarkan biaya adalah masyarakat pemilik tanah/ lahan pengambilan sumber daya alam, masyarakat yang bekerja sebagai karyawan, dan masyarakat yang memiliki ikatan keluarga dengan pihak yang mengelola atau dengan pemilik tanah.